

ABSTRACT

CREDIBILITY PARLIAMENT RIAU OF PROVINCE AFTER ANNOUNCEMENT THE CORRUPTION OF NATIONAL SPORT EVENT XVIII IN MASS MEDIA

By:

Jhonleonardo Samosir

Supervisor: Belli Nasution, S.Ip.MA

Parliament Riau of Province is representation of the people who are should give a good example for Riau of society. But sine gasping for breath the corruption of national sport event, their value in society have been changed. This research is make (1) to know is the corruption of national sport event XVIII in mass media to be a public agenda (2) to know how the credibility parliament Riau of Province after announcement the corruption of national sport event XVIII in mass media about parliament Riau of Province (3) to know how the credibility parliament Riau of Province after announcement the corruption of national sport event XVIII in mass media about society.

This research use the qualitative method. To collecting data is doing by interview and documentation. Subjek this research is society, mass media and parliament Riau of Province, while objek is credibility parliament Riau of Province.

Result this research is (1) announcement the corruption of national event XVIII in mass media have been a public agenda (2) Credibility parliament Riau of Province after announcement the corruption of national sport event XVIII in mass media about parliament Riau of Province still high (3) Credibility parliament Riau of Province after announcement the corruption of national sport event XVIII in mass media about society is down.

Kata Kunci: KREDIBILITAS, KORUPSI, MEDIA MASSA.

PENDAHULUAN

“Berdasarkan hasil Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI tahun 2006 di Jakarta, pemerintah menetapkan Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII. Hal ini secara resmi diumumkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Adyaksa Dault dan Ketua Umum KONI Pusat Agum Gumelar” (Suara Karya, 18/8/2006).

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mulai melakukan berbagai persiapan. Dimulai dari memperbaiki infrastruktur jalan hingga pembangunan lapangan untuk setiap cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Segala persiapan tersebut dilakukan untuk mensukseskan pelaksanaan *multi event* nasional yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali tersebut. “PON XVIII Tahun 2012 akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 9 September 2012 hingga 20 September 2012. Dengan mempertandingkan sebanyak 39 cabang olahraga” (www.ponriau2012.com, 2 Agustus 2012, 10.32 WIB).

Segala persiapan yang dilakukan tidak lepas dari pantauan media. Baik cetak, elektronik maupun *online*. Mulai dari persiapan infrastruktur, persiapan para Atlit Riau hingga penggunaan anggaran dari pusat selalu disajikan dalam bentuk berita. Media memegang peranan untuk mengawasi pemerintah dalam mengerjakan tugas

kenegaraannya dan mengabarkannya kepada khalayak luas. Ibidem mengatakan hal ini sebagai jurnalisme *watchdog*. Jurnalisme *watchdog* didefinisikan sebagai (1) penyelidikan independen oleh pers mengenai kegiatan pemerintah, bisnis, dan lembaga publik, (2) dengan cara mendokumentasikan, menanyakan, dan menginvestigasi kegiatan-kegiatan mereka, (3) untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pejabat mengenai isu yang sedang menjadi keprihatinan masyarakat (dalam Ishwara, 2011;19)

Salah satu berita yang menjadi hasil kerja pers ialah terungkapnya kasus suap pada Cabang Olahraga Menembak. Kasus ini mulai terungkap pada saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau melakukan rapat untuk mengesahkan revisi Perda No 6 tahun 2010. Sejak terungkapnya kasus ini, pihak KPK terus melakukan berbagai upaya untuk mengungkap para tersangka. Hal ini dilakukan mulai dari pemeriksaan saksi, penyidikan, penyelidikan dan penetapan tersangka. “Setelah memeriksa sejumlah saksi, baik itu anggota DPRD Riau, Pejabat Riau, pimpinan perusahaan, kontraktor pembangunan arena PON, penyidik KPK mengembangkan penyelidikan ke Perda No 5 tahun 2008 terkait pembangunan Stadion Utama PON” (Tribun Pekanbaru, 1/5/2012).

“Dalam kasus korupsi PON XVIII, KPK telah menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) anggota DPRD Riau menjadi tersangka. Kesepuluh orang tersebut ialah Adrian Ali, Abu Bakar Siddiq, Tengku Muhazza, Zulfan Heri, Syarif Hidayat, Muhammad Rum Zein, Ruhman Assyari, M Dunir, M Faisal Aswan dan Taufan Andoso Yakin” (Tribun Pekanbaru, 28/8/2012).

Sebagai wakil rakyat yang telah mengucapkan sumpah jabatan pada saat dilantik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau telah mengkhianati sumpahnya tersebut. Dengan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, penulis ingin melihat apakah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau masih memiliki kredibilitas.

Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana Kredibilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Setelah Pemberitaan Kasus Korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Media Massa.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui Apakah Pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa Menjadi Agenda Publik (2) untuk mengetahui Bagaimana Kredibilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Setelah Pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa Menurut Penilaian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (3) untuk mengetahui Bagaimana Kredibilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Setelah Pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa Menurut Penilaian Masyarakat.

METODE PENELITIAN

“Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau *sampling* bahkan populasi atau *sampling*-nya terbatas. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data” (dalam Kriyantono, 2010;56-57). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk meneliti Bagaimana Kredibilitas Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Setelah Pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu wawancara dan dokumentasi. “Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya” (Kriyantono, 2010;100). Dalam usulan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat, redaktur media massa dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

“Dokumentasi adalah instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data” (Kriyantono, 2010;120). Dalam usulan penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dan fakta yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini berupa Surat Kabar Tribun, Riau Pos, Kompas, Tabloid Independen Mimbar Melayu, Suara Karya dan Haluan Riau yang memuat berita korupsi PON XVIII, arsip-arsip Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Riau menyangkut struktur dan jumlah anggota dewan dalam setiap komisi.

“Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi” (Kriyantono, 2010;196). Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan tersebut, maka dilakukanlah analisis data untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berkualitas atau tidak. Hasil analisis data ini menentukan apakah riset tersebut berkualitas atau tidak.

Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep). “Tahapan-tahapan analisis, dapat dijelaskan yaitu: (1) Menempatkan kejadian-kejadian (data) ke dalam kategori-kategori. Kategori-kategori tersebut harus dapat diperbandingkan satu dengan lainnya. (2) Memperluas kategori sehingga didapat kategori data yang murni dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya. (3) Mencari hubungan antarkategori. (4) Menyederhanakan dan mengintegrasikan data ke dalam struktur *teroretid* yang koheren (masuk akal, saling berelengketan atau bertalian secara logis)” (Kriyantono, 2010;198).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Agenda *Setting* sebagai prinsip berpikir untuk meneliti apakah benar agenda media yaitu pemberitaan Kasus Korupsi PON XVII di Media Massa menjadi agenda di kalangan masyarakat. “Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu itu penting karena media menganggap isu itu penting juga” (Griffin dalam Kriyantono, 2010;224).

Artinya, teori ini mengasumsikan bahwa apa yang dipikirkan penting oleh khalayak merupakan hal penting yang dipikirkan oleh media. Karena media menganggap itu penting, maka disampaikanlah kepada khalayak sehingga khalayak merasa bahwa hal itu penting. “Model agenda *setting* mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan khalayak pada persoalan itu” (dalam Rakhmat, 2009;68).

PEMBAHASAN

Pemberitaan Kasus Korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII dan Agenda Publik

Kasus Korupsi PON XVIII di Provinsi Riau menjadi agenda pemberitaan yang penting bagi media massa. Hal ini dibuktikan melalui pemberitaan yang disajikan

sebagai *headline* pemberitaan. Sejak terungkapnya kasus tersebut pada 3 April 2012 lalu hingga saat ini, media selalu menyampaikan perkembangannya kepada khalayak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diperoleh data yang mengatakan bahwa pemberitaan kasus korupsi PON XVII di media massa merupakan agenda publik. Hal ini sesuai dengan model agenda *setting* yang telah dijelaskan pada kerangka pemikiran. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam hal ini panjang yang dimaksud adalah waktu pemberitaan kasus korupsi PON XVIII di media massa. “Kasus ini sangat penting disajikan oleh media kami. Karena kasus ini ada kepentingan masyarakat umum tentang kasus tersebut karena berkaitan langsung dengan daerah Riau. Penyajiannya selalu dimuat di halaman satu. (Hasil Wawancara dengan Pemimpin Redaksi Haluan Riau, Doni Rahim, 09/12/2012)

Pemberitaan kasus korupsi PON XVIII mendapat perhatian khusus bagi media massa. Hal ini dikarenakan kasus ini masih terus mengalami perkembangan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Alasan media kami memberitakan kasus korupsi antara lain dilatarbelakangi oleh komitmen surat kabar kami dalam mendukung pemberantasan korupsi, khususnya yang ada di Riau. Kedua, kasus korupsi PON XVIII sangat menarik ditelusuri sebab ada kaitan langsung dengan kepentingan Riau. Terlebih PON XVII dilangsungkan di provinsi Riau. Alasan ketiga, koran kami ingin menelusuri latar belakang, kejadian sampai vonis persidangan kasus korupsi PON, untuk mengetahui secara komperhensif dari kasus korupsi yang telah mencoreng daerah ini. (Hasil Wawancara dengan Pemimpin Redaksi Haluan Riau, Doni Rahim, 9/12/2012)”

Media dalam hal ini memberitakan kasus korupsi PON XVIII secara berimbang. Tidak ada pihak yang terlalu disudutkan dan tidak ada pihak yang terlalu di banggakan dalam hal pemberitaannya. Apa yang diberitakan sesuai dengan fakta persidangan.

“Penyajian dari berita kasus korupsi kita lakukan secara terbuka dengan mematuhi kode etik jurnalistik. Dari merebaknya berita kasus ini hingga persidangannya di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk memenuhi porsi keberimbangan sejauh ini, koran kami masih berupaya menyajikan berita-berita kasus Korupsi PON dengan berimbang dengan mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang diberitakan dari pemberitaan tersebut. (Hasil Wawancara dengan Pemimpin Redaksi Haluan Riau, Doni Rahim, 9/12/2012)

Dalam hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal yaitu, jarak *issue* (apakah *issue* itu langsung atau tidak langsung dialami oleh individu), lama terpaan (apakah *issue* itu baru muncul atau mulai pudar), kedekatan geografis (apakah *issue* itu bertingkat lokal atau nasional), dan sumber (apakah disajikan pada media yang kredibel atau media yang tidak kredibel).

Kasus Korupsi PON XVIII membuat hati rakyat begitu sakit karena telah mengingkari janji jabatannya. “Wakil rakyat di DPRD telah menyakiti hati rakyat dengan melakukan tindak korupsi. Mengkhianati amanah rakyat kepada mereka sewaktu serah terima jabatan.” (Hasil wawancara dengan Mustafa, Gubernur Fisip Universitas Riau, 20/11/2012).

Hingga kini kasus korupsi PON XVIII masih hangat diberitakan. Pasalnya KPK masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas. Kasus ini bertaraf lokal hingga nasional. Sehingga masyarakat Riau tahu bahkan seluruh Indonesia juga tahu melalui pemberitaan di media massa lokal dan nasional. Kasus ini diberitakan oleh berbagai macam media baik cetak maupun elektronik yang kredibel.

Hingga saat ini belum ada satu pun media yang melakukan klarifikasi karena telah salah dalam melakukan pemberitaan. Bahkan masyarakat juga tidak ada yang melakukan komplain karena pemberitaan yang tidak berimbang. Sehingga media yang memberitakan kasus tersebut masih tergolong kredibel.

Sifat-sifat khalayak menunjukkan variabel-variabel psikologis, termasuk data demografis, keanggotaan dalam sistem sosial, kebutuhan, sikap, diskusi interpersonal, dan terpaan media. Agenda masyarakat dapat diteliti dari segi apa yang dipikirkan orang (intrapersonal), apa yang dibicarakan orang itu dengan orang lain (interpersonal), dan apa yang mereka anggap sedang menjadi pembicaraan orang ramai (*community salience*).

Masyarakat yang terdiri kaum intelektual tinggal dalam lingkungan akademisi yang membuat mereka akrab bergaul dengan perkembangan informasi dan kekinian berita. Sehingga mereka mengetahui perkembangan kasus ini.

Sebagian besar informan yang diwawancarai berperan aktif dalam organisasi sosial baik yang ada di kampus maupun di masyarakat. Ir. Mardoano Manan, MT merupakan seorang dosen sekaligus Pengamat Perkotaan di Kota Pekanbaru. Yopi Pranoto merupakan seorang aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau Periode 2011-2012. Mustafa Lubis merupakan seorang Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Periode 2012-2013. Larsen Yunus Simamora merupakan aktivis Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Periode 2012-2013.

Masyarakat yang bergabung dalam sebuah organisasi sosial membutuhkan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan organisasi tempatnya bergabung. “ni berita penting tapi malas ngurusinya. ngikuti di koran-koran, berita di televisi juga, RTV tapi malas mengikutinya karena uda dari *sononya* rusaknya sebetulnya pejabat sudah tidak dipercaya lagi. sebagai rakyat kita perlu tahu siapa pelakunya berapa uang diambilnya (Hasil Wawancara dengan Yuli, Ibu Rumah Tangga).”

Sikap khalayak yang tidak tinggal diam dengan adanya kasus ini membuat mereka melakukan berbagai aksi. “Kita tidak akan biarkan wakil rakyat itu melakukan yang sesuka hatinya. Kita melakukan demonstrasi untuk menyatakan sikap penolakan tindakan korupsi itu. Kita juga menyatakan sikap kritik kita lewat tulisan di media massa. Ini bukti kita tidak setuju hati rakyat dilukai (Hasil wawancara dengan Yopi Pranoto, Aktivis BEM-UR, 20/11/2012).”

Sebuah perasaan yang sama; hati yang dilukai, membuat masyarakat sepakat melakukan aksi setelah diskusi dilakukan. Sehingga pembicaraan mereka tidak jauh dari seputaran kasus korupsi PON XVIII. Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya aksi demonstrasi oleh BEM-UNRI Periode 2011-2012 pada 26 Mei 2012 di Tugu *Countdown* PON XVIII Jalan Cut Nyak Dien dan Gedung Gubernur Riau Jalan Sudirman, Pekanbaru.

Tak dapat dipungkiri memang media yang setiap saat dapat di akses, membuat perkembangan kasus ini hingga hitungan menit pun dapat diketahui. Sehingga terpaan media lah yang membuat masyarakat semakin terpancing emosinya untuk melakukan berbagai aksi untuk menuntut kasus ini segera diselesaikan.

Efek langsung berkaitan dengan *issues*: Apakah *issues* itu ada atau tidak ada dalam agenda khalayak. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, seluruhnya mengatakan bahwa kasus ini ada dalam agenda khalayak.

“Selama kami di kepengrusuan BEM (UNRI Periode 2011-2012) kami fokus untuk membahas dan mengkritisi kasus korupsi. ini kami anggap sebagai kejahatan yang luar

biasa, banyak pejabat daerah termasuk Pemprov dan DPRD terlibat dalam kasus ini. Perda nomor 10 tahun 2008 dan 6 tahun 2010 masalah *venue* Menembak dan PON Riau memang terjadi korupsi. Kami suarakan terus supaya dituntaskan hingga menetapkan tersangka utamanya. Kami sudah indikasikan ada aktor utama di balik ini semua dan kami selalu suarakan hal ini melalui media massa kami juga katakan ada aktor intelektual di balik kasus ini. Tulisan di Ttribun Pekanbaru. Harusnya PON ajang untuk olahraga tapi kami anggap sebagai sarang korupsi. Kami turun ke jalan lebih dari belasan kali untuk menyuarakan hal ini” (Hasil wawancara dengan Yopi Pranoto, Aktivist BEM-UR, 20/11/2012).

Dari semua *issues*, mana yang dianggap paling penting menurut khalayak. Berbagai macam berita yang dikabarkan oleh media massa. Namun sejak bergulirnya kasus ini, seolah khalayak menutup mata dengan adanya kasus lainnya. Artinya adalah kasus ini menyerap begitu banyak perhatian masyarakat dibandingkan dengan *issue* lainnya.

“Saya rasa penting (kasus Korupsi PON XVIII diberitakan di media massa) biar tau masyarakat bahwa kinerja dewan itu jelek, Kinerja dewan itu adalah bobrok, bahwa di dalam dewan itu ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama menggerogoti APBD provinsi. Itu *kan* uang rakyat, kalau dikabarkan di media saya rasa itu bagus, saya sangat *surprise* terhadap media. Kita permalukan mereka yang korup itu agar mereka minimal tidak mengulang lagi kedepan, minimal orang lain akan mengingat efek jeranya, membuat nama keluarga hancur, bagus itu” (Hasil wawancara dengan Ir. Mardianto Manan, Dosen UIR, 13/11/2012)

Bagaimana *issues* itu di-ranking oleh responden dan apakah rankingnya itu sesuai dengan ranking media. Baik media maupun khalayak menetapkan kasus ini menjadi kasus yang paling penting untuk disimak. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan di atas.

Melalui pemberitaan kasus Korupsi PON XVIII di media massa, persepsi masyarakat terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau berubah. Dari awalnya masih menaruh kepercayaan kepada wakil rakyat tersebut, namun kini telah diubah oleh adanya pemberitaan yang mencoreng nama baik dewan.

“Kejadian ini adalah aib bagi dewan yang terlibat. Kalau aib itu terbuka masyarakat *kan* mulai tidak percaya. Kurang yakin masyarakat ke dia lagi. Kalau kedepan dia ingin menjabat lagi tanpa ada embel-embel uang (artinya pemilihan secara murni) dia tidak akan dipilih orang lagi. Ini adalah akibat dari perbuatannya tersebut. Saya rasa masyarakat sudah cerdas dengan semua hal itu. Sekali lagi saya katakan alat bantunya adalah media. Dengan kasus ini, masa depan politik anggota DPRD Provinsi Riau yang terlibat akan redup. Kalau perlu padam sama sekali. Harusnya begitu karena dengan dilaporkannya kasus ini akan sangat memalukan bagi mereka. Harusnya dia tidak akan berani lagi tampil di muka orang yang ramai, makanya kedepan siksaan bagi orang yang korup-mengkorup seperti itu harusnya lebih berat lagi kedepan. Saya setuju dengan baju tahanan KPK. Iini salah satu cara KPK untuk memermalukan dan menimbulkan efek jera. Kedepan kalau dapat lebih berat lagi dan ini diberikan pada orang yang benar-benar tersangka (Hasil Wawancara dengan Ir. Mardianto Manan, Dosen UIR, 13/11/2012)

Sejak bergulirnya kasus ini melalui pemberitaan di media massa, banyak aksi protes (demonstrasi) yang dilakukan dengan seruan aksi untuk menuntut agar KPK segera menetapkan para terangkanya dan dituduh karena telah melukai hati rakyat. “ Kami suarakan terus supaya dituntaskan hingga menetapkan tersangka

utamanya melalui aksi demonstrasi dan pemasangan spanduk untuk menetapkan aktor utamanya” (Hasil wawancara dengan Yopi Pranoto, Aktivis BEM-UR, 20/11/2012).

Kredibilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Setelah Pemberitaan Kasus Korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Media Massa Menurut Penilaian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Pemberitaan kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa menjadi perhatian para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Sebab kasus ini telah menyeret 10 (sepuluh) orang wakil rakyat menjadi tersangka. Bahkan 3 (tiga) diantaranya telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh KPK. Bahkan dua diantaranya telah divonis 5 tahun penjara yaitu M Dunir dan Faisal Aswan. Dengan adanya kasus ini, kredibilitas anggota DPRD Provinsi Riau menjadi perhatian khalayak bahkan anggota dewan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada kerangka pemikiran tentang matriks kepercayaan, kredibilitas menyangkut 2 (dua) hal yaitu keahlian dan kepercayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terkait keahlian dan kepercayaan mereka sebagai wakil rakyat di pemerintahan, diperoleh data yang mengatakan bahwa Kredibilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau setelah pemberitaan kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa masih tinggi. Artinya, kredibilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Setelah Pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa Menurut Penilaian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau berada di kuadran pertama.

Anggota DPRD Provinsi Riau meyakini mereka memiliki keahlian dan kepercayaan sebagai wakil rakyat di pemerintahan meskipun ada pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan para anggota dewan yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti melihat dari dua aspek, yaitu keahlian dan kepercayaan:

Keahlian

Dari semua anggota dewan yang peneliti wawancarai, diperoleh data yang menyatakan bahwa mereka merupakan orang-orang yang ahli dibidangnya dan layak untuk menjadi wakil rakyat.

“Pengalaman mendukung kredibel seseorang. Akan berbeda kredibel seseorang yang punya pengalaman lebih lama memimpin di DPRD. Ya jelas saya menguasai keterampilan teknis sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Sebab menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau itu berdasarkan suara terbanyak. Saya di pilih di partai saya (Golkar; partai pemenang). Hal ini dilakukan melalui Petunjuk Organisasi (PO) melalui partai, ini dari pimpinan pusat, pengalaman lama di DPRD (ini periode saya yang ke-3) dan pernah menggantikan Ketua DPRD Chaidir selama 1 tahun. Periode sebelumnya saya menjadi Ketua Fraksi di Partai Golkar dan pendidikan saya S2. Atas dasar inilah saya diangkat menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau untuk periode 2009-2014. sehingga jelas saya menguasai keterampilan teknis sebagai Ketua DPRD. Jelas saya memahami peran DPRD. *Masak* seorang pimpinan tidak memahami perannya? (Hasil Wawancara dengan Drs. H. Johar Firdaus, Ketua DPRD Provinsi Riau, 13 November 2012)”

Ditambahkannya bahwa dia mengikuti perkembangan kasus tersebut. Kendatipun ada pemberitaan kasus ini dirinya tidak terganggu dalam mengerjakan tugas kedewannya sebagai pimpinan DPRD Provinsi Riau.

“Kasus ini terjadi diluar mekanisme dewan, saya masih sebagai saksi dan saya tidak tau menau, tidak ada pengaruh bagi saya. Keahlian saya sama sekali tidak berkurang, justru saya harus makin terampil menghadapi situasi seperti itu. Karena *kan* sudah 10 orang, 3 sudah masuk dan 7 tersangka. Saya harus bertanggung jawab karena ini *kan* terjadi diluar forum formal. Pengaruhnya hanya terletak pada berkurangnya anggota di DPRD karena kasus ini telah menjerat 10 orang yang notabene mereka memegang kedudukan penting di DPRD Provinsi Riau. Ada pengaruh waktu kita menentukan korum dan pengambilan keputusan harus 38 orang. Misalnya pengesahan Ranperda, itu harus 38 orang, tapi kalau Rapat Paripurnanya tidak mengambil keputusan, laporan fraksi, laporan pemerintahan, rapat biasa hanya 28 orang. Saya terus mengikuti perkembangan kasus ini, kalau KPK panggil saya sebagai saksi saya hadir. Untuk 10 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka saya menjadi saksi bagi mereka semuanya. Ini sebagai tanggung jawab saya. Kefokusan mengerjakan kinerja tidak hanya saja yang menjadi tersangka ini *kan* ada yang ketua komisi, ketua badan legislatif, ketua badan kehormatan, ada pimpinan fraksi, mereka tidak maksimal dan ini berakibat pada kinerja seluruh dewan. Misalnya Ranperda. Tapi bagi saya secara pribadi tidak ada pengaruh (Hasil Wawancara dengan Drs. H. Johar Firdaus, Ketua DPRD Provinsi Riau, 13 November 2012)”

Dikatakan bahwa tidak mungkin seorang anggota dewan tidak memiliki keahliannya sebagai wakil rakyat. Hal yang serupa juga dikatakan anggota dewan lainnya saat peneliti melakukan wawancara dengannya.

“Ya saya sangat memahami *lah*. 3 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), perwakilan atau aspirasi, legislasi, *budgeting*, *control* dan ini harus dikuasai. Bagaimana kita membuat pengesahan Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD), peraturan daerah, kita juga melakukan penganggaran itu. Hak DPRD terakhir yang mengontrol pihak pemerintah. Setiap saya bekerja harus terlebih dahulu memahami perannya. Saya tidak mau memimpin rapat kalau materi tidak saya kuasai. Saya lebih baik tidak ikut rapat kalau tidak mengerti apa-apa. Saya harus kuasai dan saya sangat memahami peran saya di DPRD (Hasil Wawancara dengan H. Masnur, SH, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Riau, 19 November 2012).”

Ditambahkannya bahwa dia mengikuti perkembangan kasus tersebut. Pemberitaan kasus ini membuat dirinya terganggu dalam mengerjakan tugas kedewannya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau karena ada stigma negatif dari masyarakat.

“Saya dapat informasi kasus korupsi dari media massa, kedua dari kawan-kawan. Apa pun namanya kita satu keluarga di DPRD ini, ini pasti mengganggu. Paling tidak pencitraan DPRD di mata masyarakat, keluarga kita pun jadi terganggu. Seperti saya yang tidak terlibat, orang berpikir saya juga ikut *kan* jadi terganggu. aAdanya pemikiran negatif, kena satu kena semuanya. Kita sampaikan dan jelaskan saja pada mereka. Tapi kita masih pakai praduga tak bersalah. Secara pribadi terganggu, orang membaca dan berpikir saya juga kena. Ini wajar saja, semua orang boleh menilai (Hasil Wawancara dengan H. Masnur, SH, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Riau, 19 November 2012).”

Kepercayaan

Aspek kedua dalam membentuk kredibilitas seseorang ialah adanya rasa kepercayaan yang dimiliki. Dalam hal ini rasa kepercayaan yang dimaksudkan ialah apakah anggota dewan masih merasa percaya diri meskipun nama baik DPRD Provinsi

Riau telah dipandang negatif oleh masyarakat setelah adanya pemberitaan kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa? Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau masih merasa kredibel sebagai pemimpin rakyat setelah adanya pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan mereka.

“Saya yakin masih kredibel sebagai anggota dewan. Pemberitaan ini merupakan risiko yang harus ditanggung. Yang jelas kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selama saya dalam koridor itu, tidak ada keraguan bagi saya dalam hal kredibilitas sebagai anggota dewan. Saya berpikir masyarakat sudah cerdas, tidak serta merta hanya dengan mencuatnya kasus ini membuat institusi tidak lagi kredibel. Objektivitas dalam penilaian saya pikir perlu ada dalam hal ini karena diakui atau tidak, masyarakat memerlukan lembaga ini dan memerlukan orang-orang yang berintegritas. Nilai-nilai hidup saya tidak terganggu dengan adanya pemberitaan ini (Hasil Wawancara dengan DR Koko Iskandar, 19 November 2012).

Hal senada juga datang dari politisi Partai Golkar yang juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Drs. H. Johar Firdaus. Dikatakannya bahwa dirinya masih merasa kredibel meskipun stigma negatif ada di benak masyarakat saat ini. Karena diakuinya juga bahwa dirinya disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

“Saya masih percaya diri memiliki kredibilitas di mata masyarakat sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau. Karena tindakan suap itu *kan* dilakukn oleh orang-perorang. Jadi itu tanggung jawab mereka sendirilah. Jadi tidak berarti karena ulah mereka jadi rusak lembaga ini. Masih banyak yang bagus-bagus disini. Buktinya saya bertemu dengan masyarakat, saya menyampaikan diskusi dan makalah tidak ada masalah, masih disambut baik oleh masyarakat. Masyarakat masih respon sama saya, karena saya tidak terlibat (Hasil Wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. Johar Firdaus, 13 November 2012).

Pernyataan yang serupa juga datang dari Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, H. James Pasaribu. Politisi yang telah berusia 75 tahun ini menampik kredibilitasnya menurun akibat pemberitaan kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa. Dikatakannya bahwa dirinya masih disambut sangat baik oleh masyarakat saat melakukan peninjauan lokasi dan kunjungan masyarakat.

“Saya mengikuti perkembangan kasus ini melalui media. Mengganggu dibilang tidak tapi kita pribatin, apakah hanya DPRD yang salah? Belum ada keputusan dari pengadilan. Saya sering turun kemasyarakat tidak ada yang kecewa sama saya. Karena saya tidak melihat. Mereka yang menilai, tidak pernah dinilai seperti itu. Saya sangat dipercaya oleh masyarakat. Komunikasi dan pendekatan saya baik. 2 periode di Indradiri Hilir dan 2 periode di Riau. Karena saya telah membuktikan kinerjanya. Informasi itu pasti ada dan biasa saja *lah*, itu *lah* media. Masih percaya dengan nilai-nilai hidup saya. Saya tau benar apa yang perlu saya buat. Saya abdikan diri saya untuk kepentingan masyarakat (Hasil Wawancara dengan H. James Pasaribu, 22 November 2012).“

Selain kedua politisi tersebut, pernyataan serupa datang dari Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau, Drs. H. Adrian Ali, MH. Beliau merupakan salah satu dari 10 Anggota DPRD Provinsi Riau yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Dikatakannya bahwa dirinya masih merasa kredibel sebagai wakil rakyat, meskipun proses agar bersedia diwawancarai sangatlah sulit. Awalnya

beliau menolak untuk diwawancarai karena dia merupakan salah satu Anggota Panitia Khusus yang merumuskan Revisi Perda No 6 Tahun 2010 tentang penambahan anggaran *venue* Menembak. “Meskipun anggota DPRD ada yang sudah dinyatakan tersangka atau terdakwa, ya jelas masih percaya diri dengan jabatan saya sebagai anggota DPRD. Kita ini wakil rakyat (Hasil Wawancara dengan Drs. H. Adrian Ali, MH, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau, 22 November 2012).

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau, H. Aziz Zaenal, SH, MM yang juga merupakan salah satu Bakal Calon Gubernur Riau 2013-2018 terkait keyakinannya akan kredibilitas dirinya sebagai wakil rakyat. “Saya sangat berpositif *thinking* saya masih kredibel sebagai wakil rakyat. Hanya yang telah terlibat layak diberikan *punishment*. Tapi *reward* juga diberikan *lah*. Jangan *punish* terus. Kadang-kadang kita yang jeleknya diangkat tapi yang bagusnya tidak diangkat (Hasil Wawancara dengan H. Aziz Zaenal, SH, MM, 19 November 2012).”

Kredibilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Setelah Pemberitaan Kasus Korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Media Massa Menurut Penilaian Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait keahlian dan kepercayaan mereka terhadap wakil rakyat di pemerintahan, diperoleh hasil yang mengatakan bahwa Kredibilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau setelah pemberitaan kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa rendah. Artinya, kredibilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Setelah Pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa Menurut Penilaian masyarakat berada pada kuadran kedua.

Menurut masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Riau memiliki dan seharusnya memiliki keahlian sebagai wakil rakyat di pemerintahan meskipun ada pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan masyarakat yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti melihat dari dua aspek, yaitu keahlian dan kepercayaan:

Keahlian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh data yang mengatakan bahwa secara keahlian bahwa Anggota DPRD layak untuk menjadi wakil rakyat. Seorang aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau, Yopi Pranoto mengatakan bahwa secara teknis anggota DPRD Provinsi Riau memahami perannya namun kinerjanya tidak mengarah pada hal tersebut. “Peran dewan, secara kasat mata mereka paham. Tapi hingga saat ini aspirasi rakyat itu belum disuarakan secara penuh, mereka belum 100% memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Pada saat pemilu janji-janji politik tapi belum ada realisasinya. Secara pemahaman mereka paham tapi kinerjanya belum mengarah kepada hal itu (Hasil Wawancara dengan Yopi Pranoto, 20 November 2012). “

Hal senada juga diungkapkan salah seorang aktivis Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Larsen Yunus Simamora terkait pemahaman dan keahlian anggota DPRD Provinsi Riau. Dikatakannya bahwa secara umum pada prinsipnya anggota DPRD memahami perannya sebagai wakil rakyat meskipun pada perjalannya ada yang kurang memahami peran tersebut. “Kalau berbicara masalah skill saya belum tau pasti karena tidak mengetahui secara persuasif.

kalau gambaran umumnya, pasti memiliki skill. Itulah alasannya maka mereka dipilih oleh rakyat. sebagai *representative* rakyat di pemerintahan disetiap komisinya (Hasil Wawancara dengan Larsen Yunus, 20 November 2012). “

Namun di sisi lain, seorang dosen dari Universitas Islam Riau mengatakan tidak mampu menilai keahlian anggota DPRD Provinsi Riau tanpa adanya penelitian mendalam. Dikatakannya bahwa dirinya tidak bisa pastikan jawabannya sebelum ada penelitian terkait hal tersebut. “ Keterampilan teknis harusnya tau sebagai wakil rakyat *kan* ada masa pencerahan dan pembekalan. Kalau pun ada yang tidak tau bisa saja dia pura-pura tidak tau dan tidak memahami apa yang disampaikan pada saat pembekalan tersebut. Saya tidak bisa jawab mereka apakah mereka menguasai keterampilan teknis namun harusnya dia tau. Karena melalui akademik kita tidak bisa menduga-duga untuk hal itu (Hasil Wawancara dengan Ir. Mardianto Manan, MT, 13 November 2012). “

Keyakinan bahwa anggota DPRD Provinsi Riau memiliki keahlian sebagai wakil rakyat juga dikatakan oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Mustafa Lubis. Dikatakannya bahwa dia yakin anggota DPRD Provinsi Riau mempunyai keahlian sebagai wakil rakyat namun diakuinya belum maksimal untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. “Saya yakin mereka tau akan perannya sebagai dewan mekpiun ada sebagian yang kurang memahami. Tapi mereka ada yang mengambil cela untuk melakukan kecurangan dengan ketahuan mereka akan tugasnya di dewan. Menjadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana mereka mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan amanah masyarakat (Hasil Wawancara dengan Mustafa, 20 November 2012).”

Kepercayaan

Aspek kedua dalam membentuk kredibilitas seseorang ialah adanya rasa kepercayaan yang dimiliki. Dalam hal ini rasa kepercayaan yang dimaksudkan ialah apakah masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap anggota DPRD Provinsi Riau setelah adanya pemberitaan kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa? Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau setelah adanya pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan mereka.

Dosen Universitas Islam Riau, Ir. Mardianto Manan, MT mengatakan bahwa masa depan politik anggota DPRD yang terlibat pasti hancur. Dirinya tidak lagi memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang telah dinyatakan bersalah oleh KPK. “Bagi yang terlibat kredibilitasnya menurut saya hancur, masa depannya hancur apalagi yang sudah jadi tersangka, Hendaknya ini segera ditindaklanjuti. Segera dipidanakan dan dikurung saya rasa itu lebih baik. Ini adalah akibat dari perangai dia yang tidak benar (Hasil Wawancara dengan Ir. Mardianto Manan, MT, 13 November 2012).”

Lagi menurut Mardianto bahwa jikalau seandainya anggota DPRD Provinsi Riau yang telah menjadi tersangka atau terdakwa menyampaikan pernyataan kepada masyarakat, dikatakannya bahwa dirinya tidak lagi percaya dengan perkataan wakil rakyat tersebut. “Kalau ada dewan yang sudah tersangka yang mengeluarkan *statement* saya kurang percaya. Karena banyak bohongnya dan sudah terbukti satu persatu. Katanya tak pernah, hanya sekali, dan sering juga dan akhirnya terlibat (Hasil Wawancara dengan Ir. Mardianto Manan, MT, 13 November 2012).”

Namun di sisi lain, Mardianto masih menaruh kepercayaan kepada anggota DPRD Provinsi Riau yang dinyatakan tidak terlibat dalam kasus Korupsi PON XVIII. Dikatakannya bahwa tidak dapat dikatakan semua anggota DPRD Provinsi Riau tidak baik hanya karena beberapa yang terlibat. “Masalah kepercayaan terhadap dewan kita tidak bisa dikatakan satu bersalah semuanya kena juga. Tidak bisa seperti itu. Ini *kan* kesalahan oknum. Karena saya masih yakin ada dewan yang bisa berbuat baik (Hasil Wawancara dengan Ir. Mardianto Manan, MT, 13 November 2012).”

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD Provinsi Riau yang korup juga dinyatakan seorang aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau, Yopi Pranoto. Dikatakannya bagi anggota dewan yang telah menjadi tersangka apalagi terdakwa dan telah divonis, tidak ada lagi ruang kepercayaan baginya di mata masyarakat. “Kredibilitas dewan di mata masyarakat sudah mulai merosot sebab tidak menjalankan amanah oleh rakyat. Untuk tersangka tidak lagi percaya. Nilai hidup yang tersangka hancur dan segerakan ditindak lanjuti saja supaya kasusnya segera tuntas (Hasil Wawancara dengan Yopi Pranoto, 20 November 2012).”

Namun senada dengan pernyataan Ir. Mardianto Manan, MT, Yopi Pranoto juga masih menaruh kepercayaan bagi anggota DPRD Provinsi Riau yang tidak terlibat dalam kasus ini. Yopi mengharapkan anggota dewan yang tidak terlibat mampu menjadi perpanjangan suara rakyat di pemerintahan. “Namun yang belum jadi tersangka memang harus kita dorong untuk bekerja dengan baik Karena merekalah perwakilan kita disana (Hasil Wawancara dengan Yopi Pranoto, 20 November 2012).”

Larshen Yunus Simamora, seorang Aktivis Badan Legislatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau juga mengatakan hal yang serupa terkait kepercayaan terhadap anggota DPRD Provinsi Riau setelah pemberitaan kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa.

“Saya pastinya kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut. Mereka sudah diberikan mandat sebagai *representative* dari rakyat. Sudah selayaknya mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Hal-hal yang negatif ini kalau bisa jangan *lah* dilakukan. Secara moral bagi yang tersangka saya tidak lagi percaya. Sudah kecewa dengan apa yang dilakukannya. Karena sekali kepercayaan itu dikhianati akan sangat sulit untuk mengembalikannya lagi. Kredibilitas yang tersangka sudah menurun. Tidak lagi layak untuk dipercaya. Kalau mengeluarkan kebijakan tidak lagi dipercaya karena kasusnya tersebut (Hasil Wawancara dengan Larsen Yunus Simamora, 20 November 2012).”

Hal senada juga disampaikan Yuli, seorang Ibu Rumah Tangga tentang ketidakpercayaannya terhadap anggota DPRD Provinsi Riau.

“Dapat jabatan, kekuasaan sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk mewakili rakyat tapi dirinya sendiri, untuk kantongnya dan keluarganya.

kita tidak percaya lagi sama mereka. Pusat dan daerah *nggak* percaya lagi. Keperluan pribadi mereka menggunakan uang rakyat melalui pendapatan asli daerah. Kalau bisa ditiadakan silahkan. Karena selama ada DPRD *nggak* ada *tuh* mewakili rakyat. Orang susah tambah susah. Mereka-mereka tambah kaya. *nggak* ada lagi perwakilan rakyat. Pokoknya bobrok *lah* udah pemerintahan dari daerah sampai pusat. Jangankan DPRD, presiden pun *nggak* bagusnya itu. Olahraga dicampuraduk dengan politik (Hasil Wawancara dengan Yuli, seorang Ibu Rumah Tangga, 13 Desember 2012).”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberitaan kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa menjadi agenda bagi masyarakat saat ini. Masyarakat menilai kasus ini penting karena diberitakan secara intens oleh media. Sehingga tertanam dalam pemikirannya bahwa kasus itu penting.

Kredibilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Setelah Pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa Menurut Penilaian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau masih tinggi. Mereka menilai bahwa dirinya memiliki keahlian sebagai wakil rakyat sehingga layak untuk duduk dibangku legislatif. Selain itu mereka masih memiliki kepercayaan diri sebagai wakil rakyat meskipun ada pemberitaan tentang kasus korupsi PON di media massa.

Kredibilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Setelah Pemberitaan Kasus Korupsi PON XVIII di Media Massa Menurut Penilaian Masyarakat Rendah. Masyarakat menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang telah menjadi tersangka dan terdakwa apalagi yang telah di vonis penjara, telah mengkhianati sumpahnya saat pertama kali dilantik menjadi wakil rakyat. Hal ini yang membuat masyarakat menilai kredibilitas anggota DPRD rendah. Namun masyarakat juga masih menaruh harapan besar bagi anggota dewan yang tidak terlibat agar dengan sungguh-sungguh mengerjakan amanah masyarakat.

Saran

Saran kedepan bagi media agar memberitakan sesuatu secara berimbang. Artinya tidak hanya berita buruknya saja yang diberitakan namun juga hal-hal positif yang telah terbukti dikerjakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Hal ini saya katakan agar masyarakat tidak langsung memberikan sanksi sosial yang tinggi bagi wakil rakyat yang berkhianat. Memang benar mereka telah berbuat salah namun jangan karena kesalahan yang satu membuat satu institusi menjadi buruk.

Masyarakat diharapkan agar lebih cerdas dalam menyikapi berita di media massa. Jangan dengan mudah terpancing emosi dengan pemberitaan di Media Massa. Harus dikaji dan lakukan analisa terlebih dahulu atas berita yang disampaikan di Media Massa baru mengambil kesimpulan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus Korupsi PON XVIII diharapkan menyadari perbuatannya dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Bagi yang tidak terlibat diharapkan tetap menjaga integritasnya sebagai wakil rakyat di legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Linggar. 2005. *Teori & Profesi Kehumasan – Serta Aplikasinya di Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Barus, Sedia, Willing. 2011. *Jurnalistik.- Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Erlangga: Jakarta
- Bungin, Burham. 2011. *Penelitian Kualitatif – Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Cangara, Hafied. 2008. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- _____ 2009. *Komunikasi Politik – Konsep, Teori dan Strategi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Chaidir. 2004. *Perjalanan Tugas Wakil Rakyat DPRD Riau 1999-2004*. Sekretariat DPRD Provinsi Riau: Pekanbaru
- _____ 2007. *DPRD Riau Dari Masa Ke Masa, 1971-2007*. Sekretariat DPRD Provinsi Riau: Pekanbaru
- Dewi, Sutrisna. 2007. *Komunikasi Bisnis*. Andi: Yogyakarta
- Effendy, Uchjana, Onong. 2005. *Ilmu Komunikasi – Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- _____ 2003. *Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Hughes. Ginnett. Curphy. 2012. *Leadership: Enhancing the Lessons of Experience – Memperkaya Pelajaran dari Pengalaman*. Salemba Humanika: Jakarta
- Ishwara, Luwi. 2011. *Jurnalisme Dasar – Seri Jurnalistik Kompas*. Kompas Media Nusantara: Jakarta
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media Group: Jakarta
- Kurnia, Dheni. Novrizon Burman. Yusril Ardanis. Raya Desmawanto Nainggolan. 2011. *Profil DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014*. Sekretariat DPRD Provinsi Riau: Pekanbaru
- Lamb, Jonathan. 2009. *Integritas – Memimpin Dibawah Pengamatan Tuhan*, Perkantas Divisi Literatur: Jakarta
- Mulyana, Deddy. 2008. *Komunikasi Massa – Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*. Widya Padjajaran: Bandung
- Rakhmat, Jalaluddin. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi – Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Santana, Sepriawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Yayasan Obot Indonesia: Jakarta
- Vivian, John. 2008. *Teori Komunikasi Massa*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Werner . Severin James . Tankard, 2005. *Teori Komunikasi – Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- William L. Rivers – Jay W. Jensen Theodore Peterson, 2008. *Media Massa & Masyarakat Modern*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta

SUMBER LAIN :

- Surat Kabar Tribun Pekanbaru Edisi April – Desember 2012
- Surat Kabar Riau Pos April 2012 – Januari 2012
- Surat Kabar Haluan Riau Edisi November – Desember 2012
- Surat Kabar Nasional Suara Karya Edisi 18 Agustus 2006
- Surat Kabar Nasional Kompas Edisi 18 Desember 2012
- Tabloid Independen Mimbar Melayu Edisi 19-26 November 2012
- www.ponriau2012.com. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia